

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan belanda juga karena peraturan undang-undang yang lama menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebut sebagai “*Blue Collar*”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan dikantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai “karyawan/pegawai” (*White Collar*). Perbedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak lepas dari upaya memecah belah orang pribumi.¹

Buruh merupakan organ terpenting dalam suatu perusahaan, hal ini dikarenakan buruh merupakan ujung tombak terhadap kelangsungan suatu perusahaan. Melihat pentingnya peran buruh didalam suatu perusahaan harusnya mendapatkan timbal balik yang setimpal.

Secara umum persoalan pekerja/buruh lebih banyak diidentikkan dengan persoalan antara buruh dan majikan. Pemahaman demikian juga dipahami

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), h.25

sebagian besar para pengambil kebijakan perburuhan sehingga terjadi proses reduksi pemahaman pekerja/buruh sebagai suatu profesi dan kategori sosial.

Padahal secara makro, banyak faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap eksistensi kaum pekerja/buruh dalam menjalankan profesinya, seperti pengaruh globalisasi, kebijakan ekonomi makro, dan kebijakan perburuhan itu sendiri.²

Jika hubungan antara buruh dengan majikan ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak (buruh dan majikan), maka tujuan hukum perburuhan untuk menciptakan keadilan sosial dibidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah (*homo homini lupus*). Majikan sebagai pihak yang kuat secara sosial ekonomi akan selalu menekan pihak buruh yang berada pada posisi yang lemah/rendah. Atas dasar itulah, pemerintah secara berangsur-angsur turut serta dalam menangani masalah perburuhan ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja/buruh. Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan memberikan hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya,

² Andrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009)

upah yang layak dan sebagainya. Selain itu pemerintah juga memperhatikan kepentingan pengusaha/majikan yakni kelangsungan perusahaan.³

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini juga disebut dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini sering disebut keselamatan kerja.
3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja atau buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.⁴

³ Lalu husni, *op.cit.*, h.26

⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja)*, (Jakarta :Raja grafindo Perkasa , 2007),h.78

Mengenai masalah perlindungan sosial, teknis, dan ekonomis buruh memang menjadi pihak yang dirugikan, terutama kepada Buruh/Pekerja harian lepas. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum yang jelas bagi pekerja/buruh harian lepas.

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh harian lepas berarti membahas mengenai hak-hak pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Selama ini pihak pengusaha masih melihat pihak pekerja/buruh harian lepas sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, pihak pekerja/buruh harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja/buruh harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Padahal dalam suatu hubungan kerjasama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja/buruh harian lepas saling membutuhkan. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh harian lepas haruslah sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.

Lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh harian lepas dapat kita lihat dengan masih banyak nya buruh yang berada jauh dari kehidupan yang layak, mulai dari upah yang berada jauh dari upah minimum, tidak adanya jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja/buruh harian lepas padahal mereka bekerja dengan resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi hingga jumlah hari kerja yang melebihi perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai jumlah hari kerja maksimal untuk buruh harian lepas telah diatur dalam pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi:

1. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
2. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.⁵

Berdasarkan pasal 10 Kepmenaker Nomor 10 tahun 2004 tersebut sudah cukup jelas bahwa jumlah hari kerja untuk pekerja/buruh harian lepas ialah kurang 21 hari/bulan.

Sedangkan aturan yang membahas mengenai upah minimum untuk pekerja/buruh harian lepas tercantum pada pasal 17 Kepmenakertrans Nomor 07 tahun 2013 tentang Upah Minimum yang berbunyi :

1. Bagi pekerja/buruh yang bekerja dengan system borongan atau sistem harian

⁵ Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

lepas yang dilaksanakan 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang dilaksanakan diperusahaan setempat.

2. Upah pekerja/buruh harian lepas, ditetapkan secara bulanan dan dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari :
 - a. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima)
 - b. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (hari) dalam seminggu, upah bulanan di bagi 21 (dua puluh satu).⁶

Berdasarkan pasal 17 diatas sudah jelas bahwa seharusnya pekerja/uruh harian lepas tersebut mendapatkan upah serendah-rendahnya sebesar upah minimum tetapi pekerja/buruh harian lepas di Perkebunan Palapa PT. Ivo Mas Tunggal sampai saat ini belum juga mendapatkan upah sebesar upah minimum.

Perkebunan palapa merupakan penggabungan sebagian dari dari Perkebunan Ujung Tanjung dan Perkebunan Sam-sam yang dibentuk pada bulan Juli tahun 2000. Perkebunan Palapa memiliki IV Devisi, yaitu devisi I sampai dengan devisi IV. Devisi I dan II berada di areal Perkebunan Sam-sam (Pondok I), sedangkan devisi III dan IV berada di areal Perkebunan Ujung Tanjung (Pondok II). Pekerja/buruh yang bekerja di Perkebunan Palapa PT. Ivo Mas Tunggal adalah pekerja yang bekerja di perkebunan sam-sam dan perkebunan ujung

⁶ Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum

tanjung yang terkena pemekaran.

Diperkebunan Palapa PT.Ivo mas tunggal memiliki kurang lebih 4000 hektar lahan perkebunan sawit dan mempekerjakan kurang lebih 400 buruh harian lepas yang terbagi menjadi beberapa bagian pekerjaan diantaranya sebagai pendodos sawit, perawatan perkebunan dan lain sebagainya. Proses perekrutan buruh harian lepas dilakukan oleh mandor dalam perkebunan tersebut.

Pada tahun 2013 para pekerja/buruh harian lepas di Perkebunan Palapa mendapat upah Rp.65.000 perhari dengan upah perbulan diakumulasi menjadi Rp.1.365.000 dengan upah minimum saat itu sudah Rp.1600.000;

Pada tahun 2014 saat ini ketika upah minimum Kabupaten Siak sudah mencapai Rp.1.850.000 para pekerja/buruh belum juga mendapatkan kenaikan gaji. Dan mereka tidak tinggal diam atas kejadian, sudah banyak tindakan yang dilakukan oleh buruh harian lepas mulai dari musyawarah dengan pihak perusahaan hingga melakukan aksi mogok kerja. Namun tetap saja hak buruh harian lepas untuk mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum belum tercapai. Dengan keadaan seperti ini telah meneliti bagaimana pemenuhan hak terhadap buruh harian lepas khususnya pada permasalahan upah minimum dan bagaimana peran pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut maka menjadi latar belakang untuk menyusun skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Hak Pekerja Harian Lepas di Perkebunan Palapa PT. Ivo Mas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian bisa lebih terarah dan tidak meyimpang dari topik yang dipersoalkan maka peneliti ini hanya berkisar tentang; hak-hak pekerja/buruh harian lepas di Perkebunan Palapa PT.Ivo Mas Tunggal yakni

1. Hak atas upah yang sesuai dengan upah minimum seperti yang telah diatur dalam Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 07 tahun 2013 tentang upah minimum.
2. Hak atas tunjangan hari raya keagamaan yang berlandaskan peraturan menteri tenaga kerja Nomor 04 tahun 1994 tentang Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
3. Hak atas jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja/buruh harian lepas yang dasar hukumnya Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Selain itu yang menjadi fokus penelitian adalah upaya hukum apa yang ditempuh oleh pekerja/buruh harian lepas untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan dibahas, diteliti dan dikembangkan lebih lanjut menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hak pekerja/buruh harian lepas di Perkebunan Palapa PT.Ivo Mas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

2. Apa upaya hukum yang dilakukan pekerja/buruh harian lepas pada PT. Ivo Mas Tunggal apabila hak mereka tidak terpenuhi.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak-hak pekerja/buruh harian lepas di Perkebunan Palapa PT. Ivo Mas Tunggal.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh harian lepas supaya hak-haknya terpenuhi.

2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pikiran penulis dalam ilmu hukum terutama Hukum Ketenagakerjaan.
2. Sebagai bahan informasi kepada pekerja/buruh harian lepas bahwa mereka masih mendapat perlindungan hukum.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami masalah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap buruh harian lepas.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat memperoleh data yang akurat dan relevan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang diperoleh langsung dari pekerja/buruh harian lepas dan Perkebunan Palapa PT. Ivo Mas Tunggal dengan cara observasi langsung lapangan. Dan dengan alat pengumpul data berupa wawancara, angket. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan hak pekerja/buruh harian lepas di Perkebuna Palapa PT. Ivo Mas Tunggal.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perkebunan Palapa PT. Ivo Mas Tunggal yang berlokasi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak alasan penulis melakukan penelitian di perusahaan tersebut karena dari beberapa Perseroan Terbatas (PT) di Kecamatan Kandis Perkebunan Palapa PT. Ivo Mas Tunggal merupakan perusahaan yang banyak menggunakan pekerja/buruh harian lepas.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.⁷

Adapun populasi yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah orang atau pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan hak pekerja harian lepas. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja/buruh harian lepas di PT. Ivo Mas Tunggal dengan jumlah 384 Orang dan dari pihak Perkebunan Palapa PT. Ivo Mas Tunggal sebanyak 1 (satu) orang.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pekerja/Buruh Harian Lepas Perkebunan Palapa PT.Ivo Mas Tunggal sebanyak 38 (tiga puluh) orang atau 10 % dari jumlah populasi.

Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Ket
1	Pekeja / Buruh Harian Lepas	384 Orang	38 Orang	10 %
Jumlah		384 Orang	38 Orang	

Sumber : PT. Ivo Mas Tunggal, 2014

⁷ Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)h.43

1. Sumber Data

Adapun penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, antara lain :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner dan wawancara dengan responden pekerja/buruh harian lepas dan Perkebunan Palapa PT. Ivo Mas Tunggal.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber tertulis lainnya berupa informasi pada media cetak dan elektronik.

2. Teknik Pengumpul Data

Dalam pengumpulan data, penulis dapat mempergunakan teknik pengumpul data dalam penelitian ini dengan metode sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kenyataan hukum dalam praktek dilapangan mengenai pelaksanaan pekerja/buruh harian lepas di Perkebunan Palapa PT. Ivo Mas Tunggal.
- b. Wawancara, yaitu dalam melakukan penelitian penulis mempergunakan metode wawancara terstruktur artinya penulis dapat melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan pekerja/buruh harian lepas dan Pimpinan Perkebunan Palapa PT. Ivo Mas Tunggal.

- c. Angket, yaitu pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberikan pertanyaan untuk dijawab kepada karyawan PT.Ivo Mas Tunggal sebagai responden.
- d. Studi Dokumentasi, yaitu mempelajari amprah gaji pekerja/buruh harian lepas yang berhubungan dengan hak upah pekerja/buruh harian lepas kemudian dikaitkan dengan data yang didapat dilapangan dan dibahas sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Analisis Data

Penelitian ini penulis memperoleh sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, kemudian penulis kelompokkan dan kumpulkan yang sesuai dengan rumusan masalah untuk diolah dan disajikan dalam bentuk analisis kualitatif, artinya sumber data tersebut penulis menguraikan jelaskan dengan cara dekriptif yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan sesuai rumusan masalah dengan mempergunakan teori-teori hukum, pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penulis uraikan dalam bentuk kalimat secara sistematis, jelas dan terperinci.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini maka penulis membaginya dalam beberapa bab dan sub bab, yaitu sebagai berikut.

BAB I Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistem penulisan.

BAB II	Bab ini menerangkan umum lokasi penelitian yang berisikan tentang letak geografis Desa Bekalar kecamatan Kandis
BAB III	Tinjauan umum perburuhan.
BAB IV	Hasil penelitian dan pembahasan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh harian lepas di PT.Ivo Mas Tunggal.
BAB V	Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.